

1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan sumber informasi yang diperuntukkan bukan hanya bagi pihak internal perusahaan namun juga pihak eksternal perusahaan, hal ini membuat laporan keuangan harus sesuai dengan kriteria dalam penyusunan laporan keuangan yaitu memuat informasi yang benar, akurat, lengkap, dan tepat waktu. Untuk menjamin kebenaran laporan keuangan yang dibuat perusahaan dibutuhkan opini pihak ketiga yang independen yaitu auditor. Auditor adalah pihak yang melihat bahwa laporan keuangan yang disusun oleh manajemen telah memenuhi pedoman atau kriteria yang disepakati bersama, selain itu laporan harus sesuai dengan prinsip akuntansi berlaku secara umum. “Auditing adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut” (Agoes 2017:4).

Dalam pelaksanaannya, audit memiliki beberapa tahapan yaitu, perikatan audit, perencanaan audit, pelaksanaan audit dan pelaporan audit. Tahap pertama yaitu perikatan audit. Perikatan audit adalah kesepakatan antara auditor dan klien untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam ikatan perjanjian tersebut klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor dan auditor menyatakan kesanggupannya dengan menerima perikatan tersebut. Tahap kedua yaitu perencanaan audit. Perencanaan audit adalah prosedur-prosedur yang akan dilakukan meliputi strategi pelaksanaan audit dan lingkup audit yang akan dilakukan. Tahap ketiga yaitu pelaksanaan audit atau pekerjaan lapangan. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh bukti audit tentang pengendalian internal klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Tahap keempat yaitu pelaporan audit. Pelaporan audit dilakukan untuk menyelesaikan audit dengan meringkas dan menyimpulkan semua hasil pengujian dan menerbitkan laporan audit (Pangestika, 2020).

Laporan audit inilah yang nantinya akan digunakan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Pihak internal menggunakan laporan audit untuk mengevaluasi kinerja manajemen dan melihat keadaan perusahaan secara internal. Sedangkan, pihak eksternal memerlukan laporan audit untuk melihat perkembangan perusahaan yang diaudit. Pihak eksternal merupakan pemegang saham maupun kantor pajak. Kantor pajak memerlukan laporan audit untuk memastikan kebenaran aset yang dimiliki perusahaan dan kesesuaian pajak yang dilaporkan perusahaan.

Semakin besar suatu perusahaan maka akan semakin kompleks dan rumit juga laporan keuangannya. Perusahaan besar akan menghasilkan pendapatan yang besar. Pendapatan yang diterima dapat berupa kas maupun piutang. Piutang usaha mencakup semua tagihan kepada para pelanggan dan perusahaan afiliasi yang timbul dari penjualan secara kredit, transaksi wesel, pemberian pinjaman, dan bunga yang masih akan diterima. Piutang usaha dikelompokkan secara terpisah dari piutang kepada karyawan/pegawai karena tidak berasal dari kegiatan utama perusahaan. Piutang diluar kegiatan utama perusahaan disebut juga piutang lain-lain. Piutang lain-lain yang diharapkan akan tertagih dalam satu tahun, maka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.



piutang lain-lain tersebut diklasifikasikan sebagai aset lancar. Jika penagihannya lebih dari satu tahun, maka diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar.

PT AAA merupakan Badan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat (Bapel JPKM) yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan memiliki 10 kantor cabang serta 64 klinik yang tersebar di beberapa provinsi di Indonesia. Pada PT AAA piutang lain-lain diklasifikasikan sebagai aset lancar. Terdapat dua piutang lain-lain pada PT AAA yaitu Piutang Persekot Kerja dan Piutang lain-lain. Piutang persekot kerja PT AAA terjadi diakibatkan pengeluaran kas oleh kasir untuk keperluan non operasional seperti *gathering* karyawan, pembelian peralatan medis, pembelian persediaan obat dan lain-lain.

Dana untuk piutang persekot kerja pada PT AAA cabang Bekasi dipegang dan dikeluarkan oleh kasir atau karyawan yang tidak selalu diawasi oleh manajer keuangan pusat PT AAA, sehingga penggunaan dana piutang persekot kerja PT AAA cabang Bekasi harus jelas dan sesuai dengan tujuan penggunaan saat dilakukannya permohonan pengeluaran dana. Perlu dilakukan pemeriksaan untuk menentukan kebenaran jumlah saldo piutang persekot kerja yang dilaporkan pada laporan keuangan klien serta keefektifan dan keefesienan pengendalian piutang persekot kerja pada PT AAA cabang Bekasi. Berdasarkan uraian tersebut maka penulis memutuskan untuk mengambil judul tugas akhir “Audit atas Piutang Persekot Kerja pada PT AAA cabang Bekasi”.



Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana piutang persekot kerja pada PT AAA ?
2. Bagaimana tahapan audit atas piutang persekot pada PT AAA cabang Bekasi ?

1.3 Tujuan

Dari rumusan masalah diatas maka terdapat beberapa tujuan yaitu :

1. Menjelaskan piutang persekot kerja pada PT AAA
2. Menguraikan tahapan audit atas akun piutang persekot kerja pada PT AAA cabang Bekasi

1.4 Manfaat

Penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi :

1. Bidang Akademis
 - Sebagai bahan pembelajaran maupun referensi terkait audit atas piutang persekot kerja dan tahapan-tahapannya dari awal perikatan sampai pelaporan.
2. Bidang Praktis
 - Sebagai bahan evaluasi KAP terhadap tahapan-tahapan audit atas piutang persekot kerja yang telah dijalankan.
 - Sebagai bahan evaluasi perusahaan terhadap pengendalian akun piutang persekot kerja.